



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 770/V/2013

11/MEI 2013



NKRI Harga Mati Untuk Rakyat Papua



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA MEI 2013

Rangkuman kegiatan minggu awal Mei 2013, lebih terfokus pada kegiatan DPR-RI dalam Masa Persidangan IV 2012-2013. Berkaitan dengan Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN TA 2014 dan RKP 2014, Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 (RUU P2 APBN 2012), dan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun Anggaran 2013. Berikut ringkasan beberapa kegiatannya.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Bidang Anggaran

Pada Masa Persidangan IV Tahun Persidangan 2012-2013 yang akan dimulai pada 13 Mei 2013 ini, siklus anggaran akan dimulai. Kegiatan yang akan dilakukan oleh DPR adalah [1] Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN TA 2014 dan RKP Tahun 2014, [2] Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 (RUU P2 APBN 2012), dan [3] Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun Anggaran 2013.

Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN TA 2014 dan RKP Tahun 2014.

Sesuai dengan Pasal 157 Ayat (2) UU 27/2009 tentang MD3 dan Peraturan Tatib DPR RI Pasal 152 Ayat (2) dan (3), dinyatakan bahwa Pemerintah akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal kepada DPR pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya atau sehari sebelumnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur. Untuk melaksanakan UU tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah: [1] Tanggal 20 Mei 2013, Pemerintah menyampaikan bahan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2014 yang meliputi (i) Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2014, (ii) Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran K/L TA 2014, dan (iii) Rincian unit organisasi, fungsi, program dan kegiatan TA 2014 dalam Rapat Paripurna.



[2] Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 23 Mei 2013 untuk penyampaian pandangan Fraksi atas Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN TA 2014. [3] Tanggal 28 Mei 2013, Pemerintah menyampaikan tanggapannya atas pandangan Fraksi-Fraksi tersebut dalam Rapat Paripurna. [4] Pembahasan di Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, dimulai dengan Rapat Kerja pada tanggal 28 Mei 2013.

Untuk efisiensi dan efektifitas pembahasan, maka akan dibentuk 4 (empat) Panitia Kerja/Panja, yang akan dilaksanakan secara paralel dengan masing-masing terdiri dari 2 (dua) Panja, yaitu: Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2014 dan Panja RKP Tahun 2014 dan prioritas anggaran, yang kemudian dilanjutkan dengan perumusan laporan panja oleh Tim Perumus (Timus) dari masing-masing Panja; Panja

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dan Panja Kebijakan Transfer ke Daerah, dilanjutkan dengan perumusan laporan panja oleh Tim Perumus (Timus) dari masing-masing Panja.

Selain di Badan Anggaran, dalam pembahasan pembicaraan RAPBN 2014 dan RKP 2014 juga melibatkan komisi-komisi, yaitu: Komisi VII dan Komisi XI melakukan pembahasan asumsi dasar RAPBN 2014 dan RKP 2014 dengan mitra kerjanya; dan Raker Komisi VII dan Komisi XI melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya untuk melakukan pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L 2014 untuk disampaikan secara tertu-



lis kepada Badan Anggaran.

Hasil pembahasan Komisi-Komisi tersebut akan menjadi acuan dan sinkronisasi dalam pembahasan di Badan Anggaran. Hasil pembahasan di Badan Anggaran dengan Pemerintah akan disampaikan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 9 Juli 2013.

Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 (RUU P2 APBN 2012).

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3, Pasal 162 menyatakan bahwa “pembahasan dan penetapan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah oleh BPK ke DPR”.

RUU P2 APBN TA 2012 *diperkirakan* akan diajukan oleh Pemerintah pada tanggal 15 Juni 2013, dan akan dilakukan sesuai dengan tahapan pembahasan RUU di DPR yaitu: [1] Tanggal 18 Juni 2013, Pemerintah menyampaikan RUU P2 APBN TA 2012 dalam Rapat Paripurna untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan DPR. [2] Dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPR RI, tanggal 25 Juni 2013 untuk penyampaian pandangan Fraksi atas RUU tersebut. [3] Kemudian tanggal 27 Juni 2013, Pemerintah menyampaikan tanggapannya atas pandangan Fraksi-Fraksi tersebut dalam Rapat Paripurna.

[4] Pembahasan dilanjutkan di Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan, dimulai dengan Rapat Kerja pada tanggal 1 Juli 2013. Dalam pembahasan ini juga akan dibentuk panja, yaitu: Panja Perumus Kesimpulan, dan Panja Draft RUU. [5] BAKN dan Komisi-Komisi pun juga turut membahas RUU P2 APBN TA 2012, yaitu: Tanggal 2-5 Juli 2013, Komisi I sampai dengan IX akan melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya untuk membahas LKPP 2012; dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR dapat menyampaikan telaahan terhadap LKPP yang telah diaudit oleh BPK. [6] Hasil pembahasan RUU P2 APBN TA 2012 di Badan Anggaran dengan Pemerintah akan disampaikan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 16 Juli 2013.

Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun Anggaran 2013.

Diperkirakan tanggal 3 Juli 2013 Pemerintah menyampaikan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN TA 2013. Dalam pembahasan laporan semester 2013 ini, Badan Anggaran dengan Pemerintah akan membentuk panja perumus kesimpulan dan dilaporkan dalam rapat kerja tanggal 10 Juli 2013.

Seluruh rencana kegiatan Badan Anggaran dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013 kami lampirkan sebagai bagian dari laporan ini, dengan catatan bahwa jad-

wal kegiatan tersebut bersifat fleksibel yang artinya dapat berubah sesuai dengan tanggal pengajuan pembahasan oleh Pemerintah dan perkembangan dalam pembahasan.

Diplomasi Parlemen

Ketua DPR-RI memimpin Delegasi Kunjungan Muhibah ke tiga negara Eropa, yakni Kerajaan Denmark, Republik Lithuania, dan Republik Belarus, dari tanggal 28 April–7 Mei 2013.

Di Denmark, Delegasi DPR-RI bertemu dengan Ketua Parlemen Kerajaan Denmark H.E. Mr. Mogens Lykketoft, dan Presidium Parlemen Denmark. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengapresiasi kemajuan hubungan bilateral kedua negara yang berjalan semakin erat dan harmonis sejak tahun 1950. Berbagai inisiatif untuk meningkatkan kerjasama terus dilakukan oleh kedua belah pihak, termasuk memfinalisasi draft “*Memorandum of Understanding on Bilateral Political Consultations between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark*” sebagai kerangka awal dimulainya konsultasi bilateral kedua negara. Kemajuan bilateral lain yang berhasil dicapai adalah telah diratifikasinya “*Comprehensive Partnership Agreement between the European Union and Indonesia*” pada tahun 2010 oleh Uni Eropa, pada bulan Mei 2010 oleh Denmark, dan pada bulan April 2012 oleh Indonesia, yang mencakup kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan.

Selain dengan Pimpinan Parlemen Denmark, Delegasi DPR-RI juga melakukan pertemuan dengan Ratu Kerajaan Denmark Her Majesty Margrethe II, Istana Amalienborg, Christian IX Palais. Ketua DPR bahkan juga menjadi pembicara dalam seminar yang di adakan oleh Kedutaan Besar RI bekerja sama dengan Parlemen Denmark. Seminar tersebut mengambil tema “*Building A Highway to Indonesia: The promising role of Trade-investment and Higher Education Cooperation in enhancing Indonesia-Denmark relations*”. Acara juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan dan investasi luar negeri Denmark Mrs. Pia Olsen Dyhr. Dalam pidatonya Marzuki Alie menyampaikan mengenai peningkatan kerja sama antara ke dua negara, Indonesia memandang pentingnya hubungan kerja sama antara Kerajaan Denmark dan Indonesia untuk berkiprah di Eropa terutama bidang pendidikan, ilmu pengetahuan teknologi dan perdagangan investasi. Di Denmark, Delegasi DPR-RI khususnya Komisi I DPR, juga melakukan dialog dengan Komisi Luar Negeri Parlemen Denmark.

Di Lithuania, Delegasi DPR-RI bertemu dengan Ketua Parlemen Republik Lithuania H.E. Mr. Vydas Gedvila. Di kesempatan berikutnya, Delegasi DPR-RI bertemu dengan Perdana Menteri Republik Lithuania H.E. Mr. Algirdas Butkevicius. Selain itu, Ketua DPR juga menyampaikan pidato *Occasion of Oak Tree Planting Ceremony to Commemorate the 20th Anniversary of the Indonesia – Lithuania Diplomatic Relations*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengapresiasi kemajuan hubungan bilateral kedua negara

yang berjalan semakin erat dan harmonis, sejak pembukaan hubungan diplomatik kedua negara pada tanggal 15 Juli 1993. Kedua negara juga telah saling memberikan dukungan pada pencalonan keanggotaan di berbagai organisasi internasional, terutama pada lima tahun terakhir. Perkembangan positif ini tentu menjadi modalitas tangguh bagi kedua negara untuk juga mengembangkan kerjasama komunikasi dan kerjasama dalam berbagai sektor lainnya. Dalam bidang kerjasama ekonomi, total neraca perdagangan kedua negara mencapai US \$ 55,5 juta, dengan selisih surplus perdagangan bagi Indonesia, yang mencapai US \$ 19,5 juta. Jumlah nilai perdagangan bilateral ini masih

tergolong kecil dan belum menggambarkan kapasitas sebenarnya kedua negara dalam kerjasama ekonomi. Beberapa tantangan bagi peningkatan perdagangan di antaranya adalah transaksi perdagangan yang dilakukan melalui pihak ketiga, seperti melalui Belanda dan Taiwan, jauhnya jarak geografis yang memisahkan kedua negara, tidak tersedianya informasi awal mengenai produk-produk unggulan di kedua negara, dan beberapa tantangan lainnya.

Untuk kegiatan di Belarusia, akan dilaporkan pada Buletin Parlemenaria edisi mendatang.**

NKRI Harga Mati Untuk Rakyat Papua



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat pertemuan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, didampingi Ketua MRP (Majelis Rakyat Papua) dan Staf Khusus Kepresidenan Bidang Otonomi Khusus Velix Wanggai.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Senin (6/5) melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, beserta jajarannya, dan Ketua MRP (Majelis Rakyat Papua) yang juga didampingi oleh Staf Khusus Kepresidenan Bidang Otonomi Khusus Velix Wanggai di ruang kerjanya di Gedung DPR, Senayan Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai permasalahan yang terjadi di Papua dan mengenai Papua. Salah satunya terkait dengan pembentukan dan pendirian kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Kantor Berita Free West Papua di Oxford, Inggris. Saat itu Priyo

kembali mendesak Menteri Luar Negeri, Marty M Natalegawa untuk mengirimkan nota keberatan atau protes kepada Pemerintah Inggris yang ditembuskan kepada Ratu Inggris.

“Berkaitan dengan berita itu, saya ingin tahu pendapat

Gubernur Papua yang baru, Pak Lukas,” tanya Priyo.

Saat itu Gubernur Papua, Lukas Enembe menegaskan bahwa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan harga mati bagi seluruh masyarakat Papua, meski diakuinya untuk kede-

pannya masih banyak yang harus dibenahi atau diperbaiki. Diantaranya kesejahteraan bagi rakyat Papua, termasuk di dalamnya kesehatan, dan pendidikan.

“NKRI harga mati, tugas saya dan teman-teman di Papua untuk mensejahterakan rakyat Papua secara keseluruhan. Karena saya menilai, Negara yang paling hebat adalah Negara Indonesia. Saya sudah pernah tinggal di

Australia, dan di negara lain, tapi tidak ada yang sehebat Indonesia, dimana kita bisa duduk dan bicara bersama seperti ini,” ungkap Lukas.

Dengan pernyataan dari Gubernur Papua itu, Priyo menganggap tidak ada satu Negara pun yang bisa menyangsikan kedaulatan Negara Indonesia di Papua termasuk Inggris. Bahkan lebih lanjut Priyo menganggap pemerintah terlalu lembek menanggapi berita

tersebut.

“Hidup itu harus *sawang sinawang* atau hormat menghormati. Jika Inggris tidak ingin kedaulatannya juga diganggu, maka hormatilah kita (Indonesia-red) juga. Untuk hal ini saya meminta dengan sangat agar Menlu Marty Natalegawa untuk tidak hanya menunggu, tapi harus langsung bereaksi,” tegas Priyo. (Ayu) foto:wahyu/parle

Pansus RUU Tapera Diharap Tidak Masuk Angin

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nuawea mengharapkan, Panitia Khusus (Pansus) RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak masuk angin. Artinya terus memperjuangkan agar RUU yang sangat memihak kepada rakyat kecil ini bisa digolkan menjadi undang-undang.

“Jangan sampai menjelang finalisasi, beberapa rumusan yang tidak disetujui pemerintah tidak diperjuangkan. Kami para pekerja siap mendukung lahirnya UU Tapera sebagaimana kami ikut memperjuangkan UU Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS). Kalau perlu kami tungguin rapat sampai pagi,” kata Andi Nuawea dalam diskusi Forum Legislasi di Press Room DPR Selasa (7/5).

Dalam acara membahas perkembangan pembahasan RUU Tapera juga tampil Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umarhadi dan Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM) SPSI Nurahmat.

Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umarhadi menjelaskan, perkembangan pembahasan RUU Tapera sudah akan masuk pada tingkat Panitia Kerja. Hingga 2 April lalu sebagian besar Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah disetujui Pansus dan Pemerintah. Dari 488 DIM telah disetujui 202 DIM dan sebanyak 256 DIM dilanjutkan pembahasannya di tingkat Panitia kerja (Panja) yang akan dimulai usai reses tanggal 13 Mei mendatang, semen-



Diskusi RUU Tapera dihadiri Ketua Pansus Yoseph Umarhadi didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nuawea dan Ketua FSP RTMM SPSI Nurahmat.

tara 29 substansi masalah dibawa ke Tim Perumus terkait penyempurnaan redaksional.

Namun lanjutnya, beberapa masalah yang belum mendapatkan persetujuan pemerintah seperti kewajiban penghasilan untuk menyisihkan 5%nya untuk tabungan perumahan. Kata wajib, menurut Yoseph oleh pemerintah dihapus dan akan dimasukkan dalam peraturan menteri.

Selain itu pemerintah juga tidak setuju adanya dana awal yang perlu disiapkan pemerintah sebesar Rp 1 triliun, dengan harapan begitu UU disahkan dan diundangkan, maka bisa

segera operasional dan membangun rumah untuk para pekerja.

Presiden Konfederasi SPSI Andi Gani Nuawea menambahkan, Pansus DPR jangan takut dengan pro kontra, maju terus sebab ini untuk kepentingan rakyat. RUU Tapera sangat didukung kaum buruh sebab ini bentuk kongkrit bagaimana memperjuangkan para buruh mendapatkan perumahan. Modal awal Rp 1 triliun, menurut Andi, masih kurang kalau bisa Rp 10 triliun. “Kalau pemerintah masih menolak, Pansus supaya tetap bertahan, kami akan dukung,” tandas Andi Nuawea menambahkan. (mp) foto:wahyu/parle

DPR Sesalkan Perbudakan di Tangerang



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso.

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso menyesalkan atas terjadinya perbudakan di salah satu pabrik di Tangerang, Banten. Ia melihat hal ini sudah tidak masuk akal.

“Adanya perbudakan di zaman modern ini, saya sangat sedih, terkejut dan gundah gulana. Kok zaman sekarang masih ada. Saya betul-betul terkejut, dan tidak masuk akal adanya perbudakan di zaman modern. Gubernurnya gimana sih,” heran Priyo ketika ditemui wartawan di Lobby Gedung Nusantara III, Senin (6/5).

Ia juga mempertanyakan apakah sang pemilik pabrik memiliki akal yang sehat atau memiliki gangguan kejiwaan karena tega memperlakukan pekerjanya dengan tidak manusiawi. Sebagai tindak lanjut atas masalah ini, Priyo meminta kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar untuk segera menyelidiki kasus tersebut. Selain itu, aparat kepolisian juga harus menindak para pelaku secara tuntas.

“Menakertrans dan pihak-pihak terkait harus dimintai keterangan karena peristiwa ini sangat memalukan. Dalam kesempatan pertama usai reses nanti, DPR akan memanggil Menakertrans dan pihak terkait. Kita ingin tahu apakah pemerintah proaktif atau berpangku tangan saja,” kata Priyo. (sf)/foto:iwan armanias/parle.l

Polisi Pelindung Perbudakan Pantas Dipecat



Anggota Komisi III DPR Indra.

Anggota Komisi III DPR RI Indra menyebut kasus perbudakan yang dilakukan pengusaha pabrik kuili di Tangerang sebagai tindakan biadab. Siapapun aparat yang melindungi kegiatan ilegal ini pantas dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat.

“Kalau oknum aparat kepolisian terbukti melindungi, jadi *back up* harus dipecat dengan tidak hormat. Selanjutnya bukan sekedar diberhentikan, perlu ada sanksi pidana. Konstruksi hukum pidana yang terlibat itu bukan saja orang yang melakukan secara langsung tapi juga yang bersama-sama, turut serta juga dikenakan sanksi,” tegasnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/5/13).

Publik menurutnya sudah dapat menduga keterlibatan aparat dalam kasus yang menggejutkan ini. Pasalnya perlakuan tidak manusiawi pada 34 buruh sudah berlangsung cukup lama, bahkan ada yang sudah 1 tahun. “Kalau tidak ada *backing* tidak mungkin ini terjadi begitu lama,” tandasnya.

Lebih jauh ia meminta Menakertrans, Kepala Dinas Tenaga Kerja perlu menjadikan kasus ini sebagai kasus serius dan penting. Ia meyakini kalau fungsi pengawasan berjalan baik sesuai UU no. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pelanggaran ini tidak akan terjadi atau setidaknya tidaknya bisa diinvestigasi sejak dini. (iky)

DPR Minta Kasus Perbudakan Tangerang Diusut Tuntas

Polres Kota Tangerang diminta sungguh-sungguh menangani kasus dugaan praktik perbudakan di pabrik kual yang berlokasi di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan, Tangerang. Pengusaha dan siapapun yang terlibat melindungi kegiatan ini harus ditindak tegas.

“Saya sudah menemui Kapolres untuk memastikan pertama proses ini dijalankan sungguh-sungguh dan pelaku ditindak serius tanpa kecuali, termasuk kalau nanti ada keterlibatan aparat Polisi, TNI dan aparat desa,” kata anggota Komisi III DPR RI, - saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/5/13).

la menambahkan dalam pertemuan dengan Kapolres Kota Tangerang Kombes Bambang Priyo Angdogo sempat dihadirkan tersangka Yuki

Irawan, pemilik pabrik. Politisi PKS ini menyebut pelaku menyampaiakan penyesalannya dan siap membayar seluruh hak buruh sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya ketemu pengusaha yang telah membuat heboh itu. Saya minta dia bertanggung jawab pada hak pekerja yang belum dibayar dan ia menyampaikan komitmen akan membayar itu. Pejabat Dinas Tenaga Kerja yang juga hadir saat



Anggota Komisi III DPR Indra.

itu diminta segera menghitung berapa hak pekerja yang harus dibayarkan semuanya,” demikian Indra. (iky)

Siswono: Petani Sejahtera, Rakyat Indonesia Ikut Sejahtera

Menyusutnya lahan pertanian telah menyengsarakan kehidupan para petani di Tanah Air. Untuk itu, perlu program perluasan lahan bagi para petani agar mereka sejahtera. Bila petani sejahtera, rakyat Indonesia ikut sejahtera. Tapi, bila petani kita miskin, rakyat Indonesia juga akan miskin. Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Siswono Yudo Husodo (F-PG).

“Kunci upaya peningkatan kesejahteraan petani itu terletak pada upaya meningkatkan luas lahan pertanian bagi petani. Sekarang luas lahan petani itu rata-rata hanya 0,3 hektar. Padahal, 10 tahun sebelumnya masih 0,8 hektar. Jadi, terjadi penyempitan yang luar biasa. Negara harus membuat program untuk memperluas lahan pertanian,” ungkap Siswono yang dihubungi Parlemen baru-baru ini.

Petani yang sejahtera indikasinya sederhana saja, mereka sudah mampu membelikan sepeda, sepatu, atau baju



Anggota Komisi IV DPR Siswono Yudo Husodo.

untuk anak-anaknya. Indikasi itu sulit terjangkau bila lahan petani menyempit. “Yang terjadi di Indonesia, lahan petani semakin sempit, akibatnya daya saing kita rendah.” Sebaliknya, yang terjadi di negara-negara lain justru lahan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, agar produk pangannya bisa bersaing di pasar internasional.

Siswono lalu mencontohkan, di Belanda sebelum perang dunia ke-2 semua petaninya hanya menggarap lahan 14 hektar. Sekarang petani Belanda menggarap lahan 80 hektar. Di Brazil pemerintahnya membuka areal pertanian baru di sungai Amazone. Dan petani Brazil dibagikan lahan 25 hektar. Thailand juga memperluas areal pertaniannya. Mereka menambah terus 3 hektar lahannya tiap tahun. Akibatnya daya saing mereka meningkat.

“Di Indonesia lahan petani makin menyempit. Ini satu masalah. Oleh karena itu, tahun ini mulai 1 Mei sampai 31 Mei ini Indonesia sedang menyelenggarakan sensus pertanian. Ini menjadi strategi yang sangat penting untuk mendapatkan data-data pertanian. Sensus pertanian itu diadakan 10 tahun sekali. Sekarang 2013, yang terakhir 2003,” jelas Siswono. (mh) foto:ry/parle

Otsus Plus Papua Rancangan Presiden Belum Jelas



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menerima Gubernur Papua, Lukas Enembe S.

Pada pertemuan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam (Koordinator Politik dan Keamanan) Priyo Budi Santoso dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, Senin (6/5) terungkap rencana Presiden menetapkan perluasan otonomi khusus Papua atau yang disebut dengan Otsus plus Papua.

Kekhususan Papua dalam UU Otsus No. 21 Tahun 2011 menurut Priyo tidak hanya dengan memberikan kesempatan Papua mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Tetapi juga memberikan kesempatan pada “putra asli” Papua untuk menjadi Gubernur. Selain itu, Otsus juga mengatur pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) yang besarnya setara dengan 2% Plafon DAU (Dana Alokasi Umum) Nasional.

“Belum jelas apa yang dimaksud Presiden dengan Otsus Plus ini, yang pasti harus mengacu pada UU Otsus Papua yang sudah ada dan yang kita buat dengan susah payah, dan itu harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen,”

jelas Priyo yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemantau Otsus Papua dan Aceh DPR.

Ditambahkannya, walaupun masih banyak persoalan di Papua, itu karena UU Otsus Papua yang ada belum diimplementasikan seluruhnya. “Masih banyak PP yang belum diselesaikan untuk implementasi UU tersebut. Dan itu kesalahan terbesar pemerintah,” kata Priyo.

Menanggapi pernyataan Priyo, Staf Khusus Kepresidenan bidang Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai yang turut hadir dalam pertemuan dengan Gubernur Papua tersebut mengatakan, UU Otsus plus yang direncanakan Presiden adalah tetap mengacu pada UU Otsus yang telah disahkan DPR sebelumnya, ditambah dengan keistimewaan lain yang akan diberikan pemerintah, hal itu untuk menjawab segala persoalan yang terjadi pada Papua. Apa keistimewaan plus tersebut? Velix belum bisa menjelaskannya secara rinci. Ditargetkan draf RUU Otsus plus tersebut akan selesai pada Agustus 2013 mendatang. (Ayu) foto:wahyu/parle



Gubernur Papua Usulkan Renegosiasi Kontrak Karya dengan PT Freeport



Gubernur Papua, Lukas Enembe saat menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat Papua.

Dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso Senin (6/5) di Senayan, Jakarta, Gubernur Papua, Lukas Enembe juga menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat Papua. Dikatakannya, persoalan di Papua bukan hanya menyangkut pada UU Otsus atau Otsus Plus, namun pengimplementasiannya. Lukas menilai selama ini Dana Otsus tidak memiliki skem yang jelas mengenai penggunaannya. Akibatnya dana sebesar 32 triliun rupiah yang telah diberikan pemerintah pusat kepada Papua kurang memberikan manfaat bagi kemajuan rakyat Papua.

“Saya mengusulkan agar 80 persen dana otsus langsung disalurkan ke kabupaten. Sementara saya sebagai Gubernur hanyalah kepanjangan tangan pemerintah pusat saja, dan tidak perlu ikut mengerjakan proyek. Pembangunan biarkan dilakukan kabupaten,” ungkap Lukas.

Selain itu Lukas mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk melakukan negosiasi ulang kontrak karya dengan PT Freeport. Karena bagaimanapun juga Kekayaan alam yang diambil PT Freeport adalah milik masyarakat Papua. Sehingga sudah saatnya masyarakat Papua menikmati hasil kekayaan alamnya.

“Pemda (Pemerintah Daerah) Papua harus punya saham di PT Freeport, dan hasilnya pun jangan diambil pemerintah pusat, tetapi diserahkan kepada masyarakat Papua. Selama ini kan PT Freeport berproduksi di Papua, namun PPH (pajak penghasilan) dan PPN (pajak pertambahan nilai) nya diambil oleh Jakarta (pemerintah pusat-red),” papar Lukas.

Tidak hanya itu, penggunaan dana Otsus Papua tersebut harus diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Dan hasil dari audit tersebut harus dibuka pada publik. Dengan adanya transparansi, Lukas yakin bahwa segala persoalan yang terjadi di Papua dapat terselesaikan.

Menanggapi usulan Gubernur Papua tersebut, Wakil Ketua DPR yang sekaligus sebagai Ketua Tim Pemantau Otsus Papua dan Aceh DPR itu sangat mengapresiasinya. Lebih lanjut Priyo meminta agar usulan tersebut juga disampaikan kepada Presiden untuk segera ditindaklanjuti.

“Saya sangat mengapresiasi usulan tersebut. Kagum dan hormat saya untuk pak Lukas Enembe, karena belum genap satu bulan ia menjabat sebagai Gubernur, namun kinerjanya sudah sangat luar biasa. Ia mengedepankan kepentingan masyarakat Papua dibanding kepentingan kelompok atau pribadinya,” jelas Priyo dengan wajah berseri. (Ayu) foto:wahyu/parle

Pansus Targetkan RUU Tapera Selesai Juli 2013

Meski beberapa isu penting belum mendapatkan persetujuan pemerintah, Ketua Pansus RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Yoseph Umarhadi tetap bertekad RUU tersebut bisa diselesaikan pada Masa Persidangan (MP) IV tahun 2012-2013 Juli mendatang. MP IV akan dibuka Senin (13/5) berlangsung hingga 12 Juli 2013.

Beberapa isu penting yang belum dicapai kesepakatan diantaranya bagi warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun dan mempunyai penghasilan wajib menyisihkan tabungan sebesar 5%. Pemerintah menghapus usulan ini dan akan dimasukkan dalam peraturan pemerintah. Selain itu perlunya pemerintah menyediakan dana awal Rp 1 triliun



Ketua Pansus RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Yoseph Umarhadi.

yang dikelola Badan Pengelola Tapera, juga tidak disetujui.

Menurut Yoseph pembahasan RUU Tapera pada awal MP IV/2012-13, akan memasuki Panitia kerja (Panja) melanjutkan pembahasan 256 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari keseluruhan 488 DIM, sementara 202 telah diselesaikan pada tingkat Pansus.

Dia menegaskan, optimis pada akhir MP IV ini akan bisa diselesaikan, sebab RUU Tapera benar-benar dimaksudkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah. Dengan modal awal Rp 1 T maka diharapkan begitu RUU ini disahkan dan diundangkan langsung bisa operasional membangun rumah sederhana untuk masyarakat.

“ Kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi sementara puluhan juta rakyat masih belum memiliki tempat tinggal dan harga tanah kian mahal. Filosofinya RUU ini menggalakan sifat gotong royong atau subsidi silang,” tandas Yosef.

Presiden Konfederasi SPSI Andi Nuawea dan Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau dan Makanan Minuman Nurahmat menyatakan dukungannya atas RUU Tapera. “ Kami mendukung dan setuju sekali terhadap RUU ini karena akan mensejahterakan buruh,” ujar Nurahmat.

Sedangkan Andi Nuawea menyatakan, SPSI siap mengawal pembahasan RUU Tapera sebagaimana pihaknya mendukung UU BPJS. “ Kami siap kawal, kalau perlu sidang-sidang sampai malam pun akan kami ikuti. Sebagaimana RUU BPJS para pekerja demo besar-besaran hingga memblokir jalan tol dan akhirnya berhasil,” kata Nuawea menambahkan. (mp), foto : wy/parle/hr.

Parlemen Uni Eropa Tawarkan Kerja Sama Dengan DPR-RI

Parlemen Uni Eropa lewat delegasinya Ana Gomes bertemu Wakil Ketua BKSAP DPR RI Andi Azhar Cakra Wijaya. Parlemen Uni Eropa yang baru kali ini berkunjung ke DPR ingin menjalin hubungan yang lebih erat sekaligus memperkenalkan diri bahwa di tingkat regional, Eropa punya parlemennya sendiri, selain parlemen di masing-masing negara Eropa.

Selama ini, belum banyak diketahui bahwa di tingkat regional Eropa ada parlemennya sendiri yang diisi oleh para anggota aktif dari masing-masing parlemen negara-negara Eropa. “Mereka menyampaikan bahwa selain ada parlemen negara-negara anggota Uni Eropa, di tingkat Eropa ada juga parlemennya. Mereka menyampaikan bahwa ini perlu ada kerja sama yang mewakili parlemen Uni Eropa,” kata Andi Azhar kepada Parlemenaria usai pertemuan di Gedung DPR Senayan, Selasa (7/5) siang.



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Andi Azhar Cakra Wijaya.

Bentuk kerja sama yang hendak dijalin harus didahului oleh pertemuan pimpinan kedua parlemen. “Saya sebagai penanggung jawab grup kerjasama bilateral, mencari jalannya. Maka, tadi saya usulkan didahului dulu dengan kesepakatan antara *speaker* dulu, yaitu Ketua Parlemen Eropa dan Ketua DPR RI Pak Marzuki, “ungkap anggota F-PAN ini.

Saat ini kebetulan parlemen Indonesia masih menjadi pemimpin Asian Community 2015. Jadi, bisa mudah menjalin kerja sama. Dengan adanya parlemen Uni Eropa ini, kita tidak perlu lagi berkunjung ke setiap negara Eropa. Kita cukup mengunjungi parlemen Uni Eropa, kecuali ada kunjungan khusus ke negara Eropa tertentu. Keberadaan parlemen Eropa ini semakin memudahkan kunjungan dan menyampaikan kepentingan Indonesia bila ingin berhubungan dengan kawasan Eropa. Apalagi, sebelumnya mata uang

Eropa juga sudah disatukan.

“Jadi kita enggak usah cape-cape lagi, karena sekarang mereka mata uang sudah jadi satu, parlemen jadi satu. Ngapain kita berhubungan satu per satu lagi,” kata Andi Azhar mengomentari penyatuan yang terjadi di kawasan Eropa. Andi sendiri mengaku baru mengetahui ada parlemen di tingkat regional Eropa.

Dalam pembicaraan dengan Ana Gomes sendiri, sempat disinggung pula soal peraturan pencucian uang yang berlaku di Eropa dan Indonesia yang sama-sama ketat. Kata Ana, para pemodal di Eropa banyak melarikan dananya ke Singapura, karena di sana masih relatif lebih longgar. Maka setelah kunjungan ke DPR ini, Ana Gomes juga berencana menemui parlemen Singapura, agar segera meratifikasi peraturan tentang pencucian uang. (mh), foto : od/parle/hr.

Ida Ria : Merpati Dibutuhkan Masyarakat Indonesia Timur

Di tengah penurunan kinerja dan kritik tajam atas Merpati, BUMN sektor penerbangan ini, tetap dibutuhkan keberadaannya terutama untuk masyarakat Indonesia timur. Merpati tetap harus dipertahankan, tapi harus segera melakukan perbaikan menyeluruh. Kritik atas kinerja Merpati tak bisa dihindari dan sudah menjadi sorotan publik. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI Ida Ria Simamora (F-PD).

“Saya sudah sampaikan kepada Kementerian BUMN bahwa keberadaan Merpati ini sungguh sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia timur. Manajemennya perlu dibenahi. Ini harus dibenahi segera oleh pemerintah. Masalahnya *complicated*. Utangnya masih banyak dan kinerja manajemen kurang optimal,” ungkap Ida yang dihubungi Parlemen, Senin (6/4).

Ida menghimbau agar Direksi Merpati mampu mengatasi semua persoalan yang sedang membelit maskapai plat merah itu. DPR, lanjut Ida, sudah banyak membantu Merpati lewat mekanisme PNM. Dengan bantuan itu, Merpati harus menyambutnya dengan perbaikan yang konkrit pula. Jangan sampai rapornya merah lagi.

“Kita masih percaya pemerintah akan memberikan solusi untuk permasalahan ini. Kita percaya Menteri BUMN Pak Dahlan Iskan akan mencari solusi yang terbaik. Tentu ini harus koordinasi dengan DPR,” kata Ida.

Ditanya soal perubahan piutang pemerintah dan BUMN lainnya yang ada di Merpati sebagai saham, Ida melihat tidak mudah merubahnya. Perlu konsultasi yang intensif dengan Komisi VI DPR. Sampai saat ini, aku Ida, Komisi VI belum bertemu dengan Direksi Merpati. Jadi, belum ada keputusan untuk mengambil solusi soal piutang ini. “Tidak segampang itu. Utang Merpati, kan, banyak,” tutur Ida.

Pengalihan piutang pemerintah harus melalui prosedur panjang. Dan pembahasannya harus ada persetujuan DPR. Apa pun bentuk pengalihan piutang itu, tetap saja harus ada pembicaraan dengan DPR. “Kita mau lihat kinerja Merpati ini bagaimana.



Anggota Komisi VI DPR Ida Ria Simamora.

Konsepnya ke depan gimana. Kita belum ketemu lagi dengan direksinya,” tambahnya.

Namun demikian, diakui Ida, Merpati adalah aset negara. Merpati sangat diharapkan menjadi salah satu alat transportasi yang menghubungkan masyarakat Indonesia. Saat ini transportasi ke Indonesia timur sangat dibutuhkan. Jangan sampai kalah bersaing dengan pesawat-pesawat lain. Memang ada pesawat Garuda, tetapi Merpati ini, kita tahu menjadi salah satu transportasi yang memberikan kepuasan kepada masyarakat Indonesia timur.

Fakta ini menjadi poin kekuatan bagi Merpati. Untuk itu, Merpati harus optimal memperbaiki manajemen, terutama kinerja direksinya. Harus ada perubahan sikap di tingkat direksi atas

harapan dan kritik masyarakat selama ini, bila ingin Merpati terus bertahan mengudara di langit Nusantara. “Kita dukung pemerintah sepanjang memberikan manfaat yang bagus untuk

Merpati. Kita juga tidak ingin Merpati jadi semakin *ambrul*,” ujarnya mengakhiri pembicaraan. (mh)/foto:iwan armanias/parle

Komisi VII: Masyarakat Daerah Harus Menikmati Kekayaan Alamnya



Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana memimpin Tim Kunjungan Lapangan ke kawasan illegal mining, Solok Selatan.

Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana, menegaskan, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditunggu masyarakat Solok Selatan (Solsel) akan dikeluarkan setelah dipastikan kawasan *illegal mining* benar-benar kosong. Kapolda Sumbar dan Bupati Solok Selatan, wajib menuntaskan kasus *illegal mining* di Solok Selatan. Ini, demi kesejahteraan masyarakat dan laju pembangunan daerah.

“Saya akui Solsel memang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), baik emas, biji besi, serta puluhan perkebunan besar dan kecil. Namun daerah masih terisolir, infrastruktur jalan rusak berat, apalagi menuju kawasan pertambangan,” tegasnya kepada pers ketika melakukan kunjungan kerja ke Solok Sumatera Barat bersama 12 orang anggota Komisi VII DPR Kamis (2/5). Kedatangan tim DPR ini disambut dan dipandu oleh Bupati Solok Selatan H. Musni Zakaria.

Lebih lanjut, Sutan mengharapkan, dengan dikeluarkan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) oleh Kementerian

ESDM, kabupaten kaya ini harus mensejahterakan rakyatnya dan pembangunan daerah. Baik bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan infrastruktur jalan dan jembatan.

“Sudah saatnya masyarakat daerah menikmati kekayaan alam, bila TR dikeluarkan. Pemkab Solsel wajib mengutamakan masyarakat daerah, ini untuk menurunkan angka kemiskinan. Tapi harus dilakukan pengawasan melalui dinas atau instansi terkait nantinya,” tegasnya.

Untuk mencapai tujuan WPR, partisipasi masyarakat dibutuhkan dan bersama-sama memberantas *illegal mining*. Titik koordinat pertambangan rakyat ditentukan pemerintah daerah, sehingga kegiatan penambangan dilakukan masyarakat tidak lagi berbenturan dengan hukum.

“Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan izin penambangan, baik izin usaha pertambangan (IUP), izin

pinjam pakai kawasan hutan dari kementerian kehutanan, wajib dicabut dan dijadikan WPR,” tambah politisi Partai Demokrat ini.

Untuk mencapai lokasi penambangan, Tim Komisi VII DPR RI selain didampingi Bupati Solok Selatan H. Musni Zakaria, juga Ketua DPRD H. Khairunas, Muspida Solok Selatan dan Anggota DPRD Solsel, SKPD di lingkungan Pemda Solsel. Tim DPR dan Pemda Solsel menempuh perjalanan lebih kurang tujuh jam ke ujung Kabupaten Solok Selatan yang kaya dengan tambang emas ini.

Sesuai dengan misi Komisi VII DPR RI, pihak Pemda Solok Selatan bersama rakyatnya sudah pasti sangat berharap adanya kepastian hukum tentang permasalahan *illegal mining* ini, sehingga potensi kekayaan alam yang ada di negeri ini benar-benar berdampak pada perbaikan dan perubahan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Kepada rombongan Komisi VII, masyarakat di Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari, umumnya menyampaikan keluhan tentang kasus pertambangan ilegal. “Lebih baik pertambangan ini legal dan ada izinya (payung hukum), sehingga tidak diburu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab karena belum ada izin untuk pertambangan ini,” kata Heri salah satu perwakilan masyarakat Lubuk Ulang.

Ketua Tim Komisi VII DPR Sutan Bathoegana menyatakan bahwa pihaknya akan menginvestigasi kerusakan hutan lindung, hutan produksi dan aliran sungai Batang Hari.

Bahkan rencananya wakil rakyat itu akan membicarakan persoalan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sehingga rakyat bisa melakukan aktifitas penambangan sesuai aturan dan hukum yang berlaku. (hr), foto : eka hindra/parle/hr.

DPR Desak Pemerintah Layangkan Protes Keras Inggris



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat memberikan Keterangan Pers terkait pembukaan Perwakilan OPM di Oxford Inggris.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso mendesak pemerintah agar melayangkan protes keras terhadap Perdana Menteri (PM) Inggris dan Ratu Inggris atas didirikannya kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kota Oxford. Berita yang beredar,

kantor perwakilan OPM dibuka pada 28 April lalu. Ia menilai Inggris sudah terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Pemerintah Indonesia harus protes keras secara resmi kepada PM Inggris dan Ratu Inggris, karena ini terlalu

jauh mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Saya juga menyayangkan pernyataan Inggris yang senang dan nyaman dengan adanya OPM,” ujar Priyo ketika ditemui wartawan di Gedung Nusantara III, Senin (6/5).

Politisi Golkar ini mengingatkan parlemen Inggris terkait dengan permasalahan antara Inggris dengan Irlandia Utara yang tak kunjung usai. Ia menambahkan, bagaimana sikap Inggris jika parlemen Indonesia memprakarsai kemerdekaan Irlandia Utara di Indonesia.

“Di Inggris sendiri belum selesai soal kedaulatan sebab ada pemberontakan Irlandia. Apakah mereka senang kalau kita buka perwakilan Irlandia di sini. Inggris harus hormati Indonesia,” tandas Priyo.

Priyo sekali lagi menegaskan bahwa Indonesia harus menyampaikan protes keras kepada Inggris.

“Jadi saya ulangi, pemerintah Indonesia harus tegas sampaikan protes keras dan resmi. Untuk membahas OPM ini, nanti pukul 14.00 saya akan menerima Gubernur Papua Lukas Enembe dan staf khusus Presiden Felix Waggai,” tegas Priyo. (sf)/foto:iwan armanias/parle.

Indonesia Sambut Baik Kerjasama dengan Hungaria



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat menerima Wakil Perdana Menteri dan Wakil Ketua Parlemen Hungaria.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyambut baik rencana kerjasama antara Indonesia dengan Hungaria. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso akan segera menindaklanjuti tawaran kerjasama ini.

“Saya melihat ketulusan Pemerintah Hungaria dalam pembicaraan ini, dan tentu segera kita tindaklanjuti. Pihak pemerintah maupun parlemen Hungaria menawarkan banyak kerjasama. Mereka menyediakan karpet merah untuk Indonesia, untuk mempererat hubungan kedua negara,” jelas Priyo usai menerima Wakil Perdana Menteri dan Wakil Ketua Parlemen Hungaria di ruang rapat pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Jumat (3/5).

Priyo menambahkan, ada beberapa hal penting yang menjadi pembahasan dalam pertemuan ini. Terkait dengan sistem jaminan sosial, jaminan kesehat-

an dan jaminan pensiun, Indonesia akan menjadikan Hungaria menjadi model percontohan.

“Karena Hungaria sudah cukup lama memberlakukan sistem jaminan sosial. Tidak hanya diberlakukan kepada pegawai negeri, namun juga kepada buruh pabrik maupun orang-orang yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Hal ini yang menjadi inspirasi Indonesia untuk menjadikan Hungaria sebagai model percontohan, karena Hungaria sudah menerapkan sistem itu selama ratusan tahun,” ujar Priyo.

Di sisi lain, Hungaria mengharapkan bantuan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pintu masuk ke Asia Tenggara. Indonesia merupakan tokoh ASEAN, sehingga Hungaria berharap dengan dijalinnya kerjasama dengan Indonesia, dapat mempererat hubungan Hungaria dengan Asia Tenggara.

Terkait dengan sektor pendidikan, ada perbincangan mengenai beasiswa dan pertukaran pelajar. Hungaria menawarkan kerjasama berupa beasiswa kepada mahasiswa Indonesia. Sebelumnya juga Indonesia pernah memberikan beasiswa kepada mahasiswa Hungaria yang ingin belajar kebudayaan di Indonesia.

“Pembahasan lain yang tak kalah cukup penting, adalah terkait dengan bidang ekonomi, investasi, dan hal lain yang bersifat umum antara Indonesia dengan Hungaria. Untuk hubungan Indonesia dengan Eropa Barat sudah terjalin dengan baik, namun untuk Eropa Timur, kita memerlukan Hungaria sebagai pintu gerbang untuk wilayah Eropa Timur,” ujar Priyo. (sf) foto:ry/parle

Jadikan Penimbun dan Penyelundup BBM Musuh Bersama



Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha.

Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menyampaikan kekusaranya terhadap maraknya penimbunan dan penyelundupan BBM di sejumlah daerah di tanah air. Ia menduga aksi ini tidak lepas dari keterlibatan sejumlah oknum yang mempunyai otoritas di daerah.

“Saya mengimbau seluruh masyarakat Indonesia menjadikan penimbun

dan penyelundup BBM menjadi musuh bersama. Pelaku ini leluasa karena tidak lepas dari dukungan oknum yang mempunyai otoritas di daerah,” katanya dalam acara dialog radio Bersama Wakil Rakyat, kerja sama Pemberitaan Setjen DPR RI dengan RRI Pro3 Nasional di Jakarta, Jumat (3/5/13).

Sebagai wakil rakyat, ia banyak menerima masukan seputar aksi penyelundupan berkilo-kilo liter BBM bersubsidi tanpa ada pihak yang menegur atau melakukan tindakan hukum. Di sejumlah daerah SPBU kehabisan stok, sementara data dari Pertamina menunjukkan pengiriman melebihi kuota. BBM bersubsidi itu kemudian muncul dalam botol-botol di pinggir jalan.

“Kalau kita menerapkan *punishment* dengan benar seharusnya mereka sudah kena. Ini jadi pandangan sehari-hari dan kita memaklumi, tidak ada tindakan. Menurut saya tidak bisa be-

gitu kalau perlu masyarakat ikut serta menggerebek para penimbun itu. Karena ini berkaitan dengan masalah ekonomi yang akan menyengsarakan masyarakat,” tandasnya.

Politisi Partai Golkar ini menyebut sejak tahun 2010 lalu ia telah mengusulkan agar pemerintah menerapkan BBM dengan dua harga dengan didukung pengawasan menggunakan sistem IT. Kebijakan ini menurutnya bisa mendidik masyarakat bahwa subsidi bukan untuk si kaya tapi untuk orang miskin.

“Teknologi IT yang mendukung kontrol penjualan sudah ada, orang tidak dapat membeli apabila kuota hariannya sudah habis. Ada investasi untuk pengadaan IT tetapi itu tidak sebanding dengan penghematan subsidi yang bisa mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah,” demikian Satya. (iky)/foto:odji/parle/iw.

Indonesia Minta Thailand Dorong Negara Lain Buat UU Money Laundry

Wakil Ketua BKSAP DPR Andi Azhar Cakra Wijaya meminta bantuan Thailand untuk mendorong Singapura dan negara-negara lain di Asia Tenggara untuk mengikuti jejak Indonesia membuat Undang-undang *Money Laundry* (Pencucian Uang).

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara BKSAP dengan *The Standing Committee on Religions, Moral, Ethics, Arts and Culture The Senate of Thailand* Selasa (7/5) di ruang tamu pimpinan BKSAP, Gedung Nusantara III lantai IV, Senayan Jakarta.

Lebih lanjut Wakil Ketua BKSAP, Andi Azhar Cakra Wijaya mengatakan bahwa untuk Undang-undang Pencucian Uang yang ada di Indonesia



Wakil Ketua BKSAP DPR Andi Azhar Cakra Wijaya didampingi Wakil Ketua Hayono Isman saat menerima *The Standing Committee on Religions, Moral, Ethics, Arts and Culture The Senate of Thailand*.

adalah yang terbaik, tidak hanya di Asia Tenggara, namun juga se-Asia. Di dalam Undang-undang Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia mengatur tentang beberapa aspek korupsi, perdagangan narkoba, *human trafficking* (perdagangan manusia) dan juga perjudian.

“Sebut saja di Singapura, tidak ada Undang-undang yang memuat dan mengatur tentang larangan perjudian, sehingga para pelaku perjudian dan lainnya dengan enaknyanya lari ke Singapura untuk pencucian uang hasil

judi,” papar Andi Azhar.

Ditambahkannya hal tersebut tidak berlaku di Indonesia, karena Indonesia sudah memiliki Undang-undang yang mengatur tentang perjudian dan sebagainya. Dengan demikian, Andi menilai ada negara lain yang mengambil keuntungan dari keresahan negara tetangganya atau negara lainnya. Agar hal seperti itu tidak terus terjadi, maka Andi meminta parlemen Thailand untuk ikut mendorong Singapura dan negara-negara lainnya khususnya Negara di Asia Tenggara untuk mem-

buat undang-undang sejenis (undang-undang tentang pencucian uang).

“Pencucian uang itu kan sebuah tindakan kriminal, jadi kita dalam satu *region* harus menyamakan persepsi tersebut. Agar jangan ada yang mengambil keuntungan dari keresahan negara lain. Jika semua *region* memiliki undang-undang serupa, maka saya yakin tidak akan ada lagi kegiatan *money laundry* atau pencucian uang. Itulah salah satu visi dan misi dibentuknya Komunitas Asean, agar saling membantu,” ungkap Andi. (Ayu)

Dharma Wanita DPR Gelar Tutorial Hijab



Ketua Dharma Wanita Setjen DPR Titi Djuned.

Dharma Wanita Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar tutorial hijab untuk para ibu-ibu anggota Dharma Wanita, Rabu (8/5). Bertempat di ruang rapat BAKN DPR RI, tutorial ini untuk membuka wawasan dan pengetahuan para ibu tentang fashion. Berbusana muslim tak perlu takut ketinggalan zaman dan inovasi. Para ibu diberi pe-

tunjuk bagaimana harus mengenakan hijab dengan praktis dan simpel, tapi tetap terlihat modis dan anggun.

Dharma Wanita bekerja sama dengan Haura Beauty Hijab, mempraktekkan langsung bagaimana harus mengenakan hijab sesuai dengan bentuk wajah. Tak mengenal tua dan muda, tutorial hijab ini, sangat bermanfaat bagaimana harus memilih bahan hijab dan mengenakannya untuk ke kantor, ke pesta, dan keseharian.

Sebelum tutorial digelar pula promo penggunaan Al Quran digital dengan 33 fitur. Al Quran ini, telah mendapat rekor MURI. Bagaimana harus membaca Al Quran dengan baik, mengenal hukum tajwidnya, terjemahan, hingga tafsirnya lengkap dalam satu panel alat peraga seperti pena. Alat itu memudahkan pembacanya mengeksplorasi Al Quran lebih jauh. Harganya pun hanya Rp 1,7 juta. Para ibu begitu

tertarik melihat kelengkapan Al Quran yang satu ini.

Ketua Dharma Wanita Setjen DPR RI Titi Djuned menjelaskan, kegiatan seperti ini selalu mewarnai even arisan 2 bulanan yang digelar Dharma Wanita. Jadi, tidak hanya arisan semata, tapi Dharma Wanita berusaha mengisinya dengan sesuatu yang bermanfaat. Pemberdayaan wanita menemukan momentumnya bersama Dharma Wanita. Rencananya, kata Titi, 2 bulan yang akan datang, *event* arisan akan diisi ceramah oleh ahli hukum waris.

Para ibu perlu dibekali seputar hukum-hukum keluarga. Ada ahli hukum waris yang siap didatangkan oleh Dharma Wanita. Dan biasanya para ibu sangat antusias mengikuti setiap *event* arisan ini. Karena tidak sekadar kumpulan dan bercengkrama, tapi juga ada ilmu yang didapat setiap kali mengikuti arisan. (mh)

Komisi II DPR Akan Panggil Mendagri Terkait Kisruh E-KTP

Himbauan Mendagri Gamawan Fauzi agar e-KTP jangan terlalu sering difotokopi dan di-stapler, karena ada *chip* di dalamnya, sehingga akan rusak mengejutkan berbagai pihak termasuk kalangan DPR.

Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa yang dihubungi wartawan baru-baru ini mengaku sudah berulang-

kali mem-fotokopi e-KTP nya untuk berbagai keperluan. Dia tak tahu ternyata e-KTP tidak boleh terlalu sering difotokopi karena ada *chip*nya.

“Saya sendiri sudah beberapa kali fotokopi KTP dan hal itu tidak bisa dihindari, kenapa tidak boleh di-fotokopi, artinya ini kan kualitasnya perlu kita pertanyakan,” kata



Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa.

Agun. Ditambahkannya, ia menilai persoalan tersebut lebih kepada politik kebijakan (pengadaan) *card reader* atau perangkat pembaca.

Dalam Surat edaran Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tanggal 11 April 2013 mewajibkan kelengkapan teknis untuk penerapan KTP Elektronik, termasuk perangkat pembaca (*card reader*). Mulai 1 Januari 2014 KTP lama tidak berlaku lagi. Sementara *card reader* bisa dibeli dari luar negeri dan Kemendagri siap memfasilitasinya. Namun badan pengkajian dan penerapan teknologi sudah mampu memproduksi dengan harga murah.

Sementara itu Anggota Komisi II dari Fraksi Golongan Karya, Markus Nari saat dihubungi Parlemen ditengah terpisah, Jumat (10/5) mengatakan bahwa hal itu menjadi

bukti bahwa selama ini E-KTP tidak terprogram dengan baik oleh pemerintah.

“Seharusnya jauh-jauh hari sudah harus disampaikan ke masyarakat tentang larangan atau anjuran agar e-KTP tidak boleh difotokopi. Sehingga hal tersebut tidak sampai menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujar Markus.

Keterlambatan informasi tersebut menurut Markus sangat berbahaya terutama di masa-masa pendaftaran untuk calon Legislatif (Caleg) DPD dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), dimana KPU (Komisi Pemilihan Umum) mewajibkan calon Kepala daerah untuk mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendukungnya sebagai persyaratan utama pencalonan. Sedangkan tidak sedikit masyarakat enggan mengumpulkan e-KTP karena khawatir rusak.



Anggota Komisi II DPR Markus Nari.

Untuk itu setelah masa reses atau di awal masa persidangan mendatang, Komisi II secara khusus akan meminta pertanggungjawaban Mendagri Gamawan Fauzi serta evaluasi e-KTP.

“Jika memang dari evaluasi tersebut terungkap adanya penyelewengan, tentu akan segera kami tindaklanjuti,” tambah Markus. (Ayu)

Langgar Hukum Bila KRL Ekonomi Ditarik

Sejak Selasa (7/5) lalu, Kereta Rel Listrik (KRL) ekonomi menghilang dari trayeknya, terutama jurusan Serpong-Tanah Abang dan jurusan Bogor-Kota. Tidak hanya masyarakat kecil pengguna KRL yang mengeluhkan situasi ini, anggota DPR dan pejabat Kementerian Perhubungan pun mempertanyakannya. Padahal, KRL sudah mendapat subsidi Kemenhub, sehingga tidak ada alasan lagi menarik KRL secara sepihak.

Seperti diketahui, PT. Kereta Api Indonesia (KAI) menarik KRL dari trayeknya dengan alasan keselamatan penumpang. KRL tersebut kondisinya sudah sangat memprihatinkan, sehingga perlu perawatan secara berkala. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya atas penarikan ini. Masyarakat pengguna KRL di Stasiun Serpong dan Tanah Abang menunggu berjam-jam kedatangan KRL ekonomi itu.

Akhirnya, mereka menggunakan KRL jurusan Rangkas

Bitung-Tanah Abang yang sangat padat penumpang dan sangat lama tiba di stasiun. KRL Rangkas-Tanah Abang juga sangat terbatas armadanya. Jadi, sangat wajar masyarakat ekonomi menengah ke bawah begitu kecewa dan marah atas menghilangnya KRL Serpong-Tanah Abang tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI Arwani Thomafi, baru-baru ini, mengatakan, penarikan KRL Serpong-Tanah Abang secara sepihak oleh PT. KAI tanpa berkoordinasi dengan Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub merupakan pelanggaran hukum. “Hal itu sangat disayangkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama masyarakat pengguna KRL relasi tersebut,” kata Arwani Thomafi.

Anggota F-PPP itu, menjelaskan, perjanjian PT. KAI dengan Ditjen Perkeretaapian menyebutkan, penghapusan kereta api ekonomi non-ac diperbolehkan apabila perubahan pola subsidi kereta api sudah selesai dibahas dengan DPR. Bah-

kan, kata Arwani, pada Juli 2013 akan ada perubahan pola subsidi untuk KRL.

“Pola perubahan subsidi itu harus tetap mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat bawah. Formulasi itu hingga kini belum pernah disampaikan kepada DPR,” tutur Arwani.

PT. KAI sendiri belum menyiapkan pengganti gerbong KRL ekonomi yang ditarik sepihak tersebut. Padahal, subsidi langsung kepada masyarakat miskin melalui KRL ekonomi terus diberikan.

Sementara itu, dalam aturan mainnya, PT. KAI sebenarnya sudah melanggar hukum. Pasal 114 UU No.23/2007 tentang Perkeretaapian disebutkan, “Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib merawat sarana perkeretaapian agar tetap laik.” Aturan ini sangat jelas. Bila PT. KAI sampai menarik KRL-nya berarti sebagai pihak yang dipercaya mengoperasikan KRL, tidak lagi mampu menjalankan amanat UU.

Arwani mendesak PT. KAI mencabut kebijakan penarikan atau penghapusan KRL ekonomi. Pihaknya juga mendesak Kemenhub memberi sanksi tegas atas pelanggaran yang



Anggota Komisi V DPR Arwani Thomafi.

dilakukan PT. KAI. Sementara Kepala Humas Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Muhartono kepada pers mengatakan, KRL sepenuhnya milik pemerintah. Tidak ada alasan bagi PT. KAI menarik KRL apa pun yang terjadi, karena sudah jadi tugasnya. (mh)

Inovasi Kuliner Harus Dilakukan

Inovasi kuliner yang bersumber dari keragaman sumber pangan nasional harus dilakukan para petani nasional, bila tidak ingin kalah bersaing dengan produk asing. Apalagi, kelas menengah Indonesia kian meningkat jumlahnya. Mereka juga menuntut produk pangan dan kuliner yang berkualitas. Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Siswono Yudo Husodo, baru-baru ini kepada Parlemenaria.

“Antara tahun 2000 dengan 2011 itu, kelas menengah Indonesia meningkat dari sekitar 25% menjadi sekitar 40%. Ada peningkatan dari berpendapatan rendah ke pendapatan menengah. Mereka ini menuntut pangan yang lebih banyak dan kualitas pangan yang juga lebih baik,” ungkap Siswono.

Kelas menengah tidak lagi mengonsumsi makanan yang terlalu sederhana. Karena belum memenuhi selera kaum menengah, produk pangan nasional bisa ditinggal masyarakat Indonesia sendiri. Mereka bisa beralih ke produk impor. “Mereka tidak lagi makan makanan yang terlalu sederhana. Nah, itulah yang menjawab mengapa



Anggota Komisi IV DPR Siswono Yudo Husodo.

konsumsi buah-buahan impor kita *demandnya* luar biasa.”

Di setiap pelosok daerah, lanjut Siswono, buah-buahan impor mendominasi. Sementara pada saat yang sama kualitas produk pangan kita tidak meningkat, memenuhi tuntutan selera masyarakat yang sudah tinggi. “Kita ambil contoh beberapa. Kita produksi apel di Malang. Jujur harus kita katakan apel impor lebih baik. Kita mem-

produksi anggur di Bali utara. Dan anggur impor tetap lebih baik. Kita punya durian tetapi tidak homogen. Macem-macam rasanya, bisa manis, manis sekali, enak, bisa juga dingin,” tutur Siswono.

Sementara bila kita membeli durian Bangkok semua rasanya sama. Durian Bangkok jadi lebih populer di Indonesia dibanding varietas durian lokal. Sekali lagi selera masyarakat yang kian tinggi dan populasi penduduk juga yang kian meningkat, menuntut inovasi kuliner dari sumber pangan nasional yang lebih baik dan berkualitas.

“Kita tidak bisa lagi membiarkan saudara-saudara kita memakan jagung dan ubi apa adanya. Sudah menuntut sajian kuliner yang lebih baik. Jujur dari sisi kuliner ini, kita ketinggalan bila dibandingkan Korea Selatan. Masakan Korea itu sudah mendunia. Apalagi Jepang dengan *sashimi*, *kobesteak*, *shabu-shabu*. Kita bahkan sudah tertinggal oleh Thailand. Thailand pun sudah mendunia. Kita masih tradisional, padahal kita kaya dengan kuliner.” (mh)

BKSAP Menerima Kunjungan Parlemen Thailand



Suasana pertemuan BKSAP DPR dengan The Standing Committee on Religions, Moral, Ethics, Arts and Culture The Senate of Thailand.

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Selasa (7/5) menerima kunjungan *The Standing Committee on Religions, Moral, Ethics, Arts and Culture The Senate of Thailand* (Ketua Badan Agama, Moral, Etika, Seni dan Budaya Thailand) di ruang tamu Pimpinan BKSAP, di Gedung Nusantara III DPR RI.

Pertemuan ini menurut Wakil Ketua BKSAP, Andi Azhar Cakra Wijaya bertujuan untuk memperkokoh atau mengembangkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand. Kerjasama itu tidak sebatas pada bidang ekonomi, namun juga dalam bidang politik, sosial, budaya dan bidang-bidang strategis lainnya.

“Hubungan bilateral tidak hanya sesama pemerintah kedua Negara saja, namun juga hubungan kerjasama antar parlemen kedua Negara, terutama saling tukar pandangan dan pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas keparlemenan, baik yang menyangkut fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran,” jelas Andi Azhar.

Tidak hanya itu, hubungan baik kedua Negara yang telah terjalin dengan baik itu masih bisa terus dikembangkan salah satunya melalui pertukaran budaya sebagai bagian untuk mendukung tercapainya cita-cita komunitas sosial ASEAN (*ASEAN Community*).

“Sebagai Negara yang terlibat secara langsung dalam pembentukan ASEAN, Indonesia dan Thailand harus lebih berpartisipasi secara aktif dalam menyelesaikan Komunitas

ASEAN (*ASEAN Community*),” jelas Andi yang juga anggota Komisi III DPR RI ini.

Sementara itu Ketua Dewan Penasehat Badan Agama, Moral, Etika, Seni dan Budaya Thailand, Emeritus Trunghai Buranasomphob, saat diwawancarai Parleментарia mengatakan bahwa kerjasama antara Thailand dan Indonesia ini karena kedua Negara sedikit banyak memiliki persamaan di bidang sosial dan budaya, bahkan kedua Negara ini juga menganut berbagai macam agama di dalamnya, namun tetap hidup rukun dan damai.

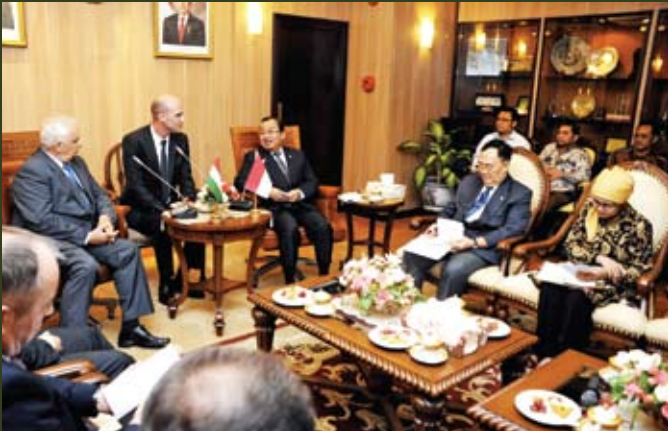
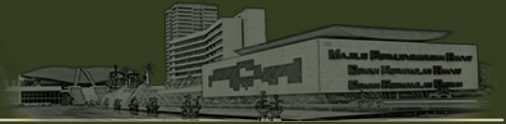


Penyerahan cinderamata oleh Wakil Ketua BKSAP DPR Hayono Isman didampingi Wakil Ketua Andi Azhar Cakra Wijaya kepada delegasi *The Standing Committee on Religions, Moral, Ethics, Arts and Culture The Senate of Thailand*.

“I’m interested with Indonesia Culture. Indonesia is similar with Thailand, we have many religions and we can live together with the many religion, so harmony. (Saya sangat tertarik dengan budaya Indonesia. Indonesia sama dengan Thailand memiliki banyak agama, dan kita bisa hidup bersama dengan perbedaan itu, sangat harmonis),” jelas Emeritus Trunghai.

Ditambahkan Andi Azhar pertemuan tersebut sedikit banyak menjawab berita yang beredar tentang konflik Pattani di Thailand. Karena dalam rombongan delegasi Thailand yang ikut berkunjung ke DPR ini juga terdapat utusan dari Pattani.

“Mereka terlihat biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Dari sana saya melihat bahwa konflik Pattani itu disebabkan karena masalah politik, bukan agama,” ungkap Andi. (Ayu)/ foto: iwan armanias/parle.



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Priyo Budhi Santoso didampingi Anggota BKSAP Atte Sugandi dan Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti menerima Wakil Ketua Parlemen Hungaria Janos Latorcai dan Wakil Perdana Menteri Hungaria Zsolt Semjen di ruang tamu Pimpinan DPR RI, Jumat (3/5). Foto:RY/parle.



Penyerahan cinderamata oleh Wakil Ketua BKSAP Andi Azhar Cakra Wijaya kepada delegasi The Standing Committee on Religions, Moral, Ethics, Arts and Culture The Senate of Thailand, Selasa (7/5). Foto: Iwan Armanias/Parle.



Penyerahan cinderamata oleh Wakil Ketua BKSAP Andi Azhar Cakra Wijaya kepada Ana Gomes, anggota delegasi Parlemen Uni Eropa, Selasa (7/5). Foto: Odji/Parle.



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR yang dipimpin Sutan Bathoegana saat meninjau kawasan ilegal mining di Lubuk Ulang Aling Selatan, Kecamatan Sangir Batanghari, Solok Selatan - Sumatera Barat, Kamis (2/5). Foto: Eka Hindra/Parle.

